MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN MELAWI

TUGAS AKHIR

Program Studi Sarjana Arsitektur
Jurusan Arsitektur

Oleh:
DEFCRIS YALDISO SAIMAN
NIM D1031211055

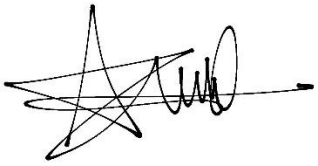
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Defcris Yaldiso Saiman
NIM : D1031211055

Menyatakan bahwa Laporan Proyek Tugas Akhir yang berjudul "Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Melawi" tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi manapun. Sepanjangpengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Saya sanggup menerima konsekuensi dan hukuman dikemudian hari yang saya buat ini tidak benar.

Pontianak, 11 Juni 2025



Defcris Yaldiso Saiman
D1031211055

LEMBAR PENGESAHAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS TEKNIK
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124
Telepon (0561) 740186, WA: +6282152280907
Email: ft@untan.ac.id Website: http://teknik.untan.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

MALL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN MELAWI

Jurusan Arsitektur
Program Studi Sarjana Arsitektur

Oleh:

Deferis Yaldiso Saiman
NIM D1031211055

Telah dipertahankan di depan Penguji pada tanggal 11 Juni 2025
dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana.

Susunan Dosen Penguji Tugas Akhir:

Pembimbing Utama	Penguji Utama
M. Nurhamsyah, S.T., M.Sc.	Bontor Jumaylinda BR Gultom, S.T., M.T
NIP. 19800306 200212 1 003	NIP. 19810522 200812 2 003
Pembimbing Kedua	Penguji Kedua
Hamdil Khaliesh, S.T., M.T.	Dr. Ivan Gunawan, S.T., M.Sc.
NIP. 19841226 200801 1 003	NIP. 19830813 201012 1 004

Pontianak, 11 Juni 2025
Dekan,

Dr.-Ing. Ir. Slamet Widodo, M.T., IPM
NIP. 19671223 1992031002

ii

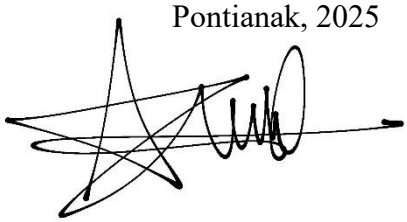
KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya yang berlimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal Tugas Akhir ini dengan judul " **Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Melawi** " sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Tujuan dari penulisan Proposal Tugas Akhir adalah sebagai syarat untuk mengikuti Pra Tugas Akhir mahasiswa Prodi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura. Dalam penyusunan Proposal Tugas Akhir ini, penulis mendapatkan banyak dorongan dan dukungan yang berarti bagi penulis. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya yang selalu mendoakan dan mendukung saya selama perkuliahan saya.
2. Bapak Ir. Slamet Widodo, M.T., IPM. Selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura;
3. Bapak Syaiful Muazir, S.T., M.T., PhD., selaku Ketua Program Studi Arsitektur Universitas Tanjungpura
4. Bapak Dr. Uray Fery Andi, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Arsitektur Universitas Tanjungpura
5. Bapak Valentinus Pebriano, ST, MT selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya dalam berbagai hal selama perkuliahan;
6. Bapak M. Nurhamsyah S.T., M.Sc, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing dan mengarahkan, dalam penyusunan dan penulisan Proposal Tugas Akhir ini;
7. Bapak Hamdil Khaliesh, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah membimbing dan mengarahkan, dalam penyusunan dan penulisan Proposal Tugas Akhir ini;
8. Dosen penguji pertama ibu Bontor Jumaylinda Br Gultom, ST, MT
9. Dosen penguji kedua bapak Dr. Ivan Gunawan, ST, MSc
10. Seluruh Dosen Program Studi Arsitektur Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan;

11. Diri saya sendiri yang telah bertahan hingga titik ini. Perjalanan mengerjakan Proposal Tugas Akhir ini bukanlah sesuatu yang mudah. Namun, saya tetap memilih untuk melangkah, menyelesaikan satu halaman demi halaman dengan segala usaha dan keikhlasan.

Pontianak, 2025



Defcris Yaldiso Saiman

D1031211055

ABSTRAK

Kualitas pelayanan publik di Indonesia hingga saat ini masih menjadi perhatian utama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, seperti rendahnya kualitas layanan, keterbatasan fasilitas pendukung, dan tidak adanya integrasi layanan dalam satu sistem yang terpadu, menjadi hambatan serius dalam meningkatkan kepuasan masyarakat. Hal ini juga dirasakan oleh Kabupaten Melawi, sebuah kabupaten baru di Provinsi Kalimantan Barat, yang menghadapi permasalahan serupa. Tidak tersedianya satu lokasi pusat pelayanan yang mampu menampung seluruh jenis layanan publik, serta jauhnya jarak antar instansi pemerintahan, menyebabkan kesulitan akses bagi masyarakat dan berdampak langsung terhadap efektivitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan.

Sebagai bentuk solusi atas berbagai permasalahan tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Melawi merencanakan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP). MPP merupakan konsep layanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan dari instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan sektor swasta dalam satu lokasi strategis. Keberadaan MPP diharapkan dapat memangkas jalur birokrasi yang panjang, meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat, serta mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif. Selain menyediakan layanan administratif, MPP juga akan dilengkapi dengan fasilitas pendukung, seperti ruang tunggu yang nyaman, area parkir yang luas, serta sistem digital yang mendukung pelayanan secara cepat dan efisien.

Implementasi Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Melawi juga merupakan bagian dari strategi nasional dalam upaya reformasi pelayanan publik yang menekankan pada penguatan pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat. Dengan adanya MPP, diharapkan dapat tercipta model pelayanan publik yang lebih baik, merata, dan berkualitas, serta mampu memberikan dampak positif terhadap

peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Inisiatif ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Kata kunci: Mal Pelayanan Publik, Masyrakat, Kabupaten Melawi.

ABSTRACT

The quality of public services in Indonesia remains a major concern in the effort to realize good governance. Various challenges in service delivery—such as poor service quality, limited supporting facilities, and the lack of integrated service systems—pose serious obstacles to improving public satisfaction. This issue is also experienced by Melawi Regency, a relatively new administrative region in West Kalimantan Province, which faces similar problems. The absence of a centralized service center to accommodate all types of public services, along with the considerable distance between government offices, hampers community access and directly affects the effectiveness and efficiency of public services.

As a solution to these problems, the local government of Melawi Regency plans to establish a Public Service Mall (Mal Pelayanan Publik/MMP). MPP is a one-stop integrated service concept that brings together services from government agencies, state-owned enterprises (BUMN), and the private sector in a single strategic location. The presence of an MPP is expected to streamline bureaucratic processes, improve service accessibility for the public, and encourage the creation of public services that are more transparent, accountable, and responsive. In addition to administrative services, the MPP will also be equipped with supporting facilities such as comfortable waiting areas, adequate parking spaces, and a digital service system to enhance speed and efficiency.

The implementation of the Public Service Mall in Melawi is also part of a national strategy to reform public service delivery, focusing on strengthening services based on the needs of the community. With the establishment of the MPP, it is expected that a better, more equitable, and higher-quality public service model can be achieved, contributing positively to public trust in government institutions. This initiative aligns with the principles of good governance, which emphasize effectiveness, efficiency, participation, and service orientation.

Keywords: Public Service Mall, Community, Melawi Regency

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
ABSTRAK ..... **v**
ABSTRACT ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah Perancangan 3
1.3 Tujuan Perancangan 3
1.4 Sasaran Perancangan 4
1.5 Lingkup Lokasi dan Perancangan 4
1.6 Metode Perancangan 5
1.6.1 Keaslian Perancangan 5
1.6.2 Pendekatan Perancangan 7
1.6.3 Metode Perancangan 7
1.6.4 Objek Perancangan 8
1.6.5 Diagram Alur Perancangan 10
1.7 Metode Perancangan 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **13**
2.1 Tinjauan teoritik 13
2.1.1 Pengertian Mal 13
2.1.3 Pengertian Pelayanan Publik 13
2.2 Aturan, Norma, dan Standard 15
2.3 Data Umum Lokasi 16
2.3.1 Kondisi Geografis Kabupaten Melawi 16

2.3.2 Iklim 17
2.3.3 Sosial dan Budaya 18
2.3.4 Tata Ruang Wilayah Kabupaten Melawi 18
2.4 Studi Komparasi 19
2.4.1 Mal Pelayanan Publik Batam 19
4.2.4 Mal Pelayanan Publik Yogyakarta 21
2.4.3 Tbilisi Public Service Hall 24
BAB III LANDASAN KONSEPTUAL 27
3.1 Analisis Fungsi dan Tema perancangan 27
3.1.1 Analisis Fungsi 27
3.1.2 Analisis Tema Perancangan 28
3.2 Analisis Internal 29
3.2.1 Pelaku 29
3.2.2 Kebutuhuan Ruang dan aktvititas 30
3.2.3 Hubungan Ruang dan Organisasi Ruang 36
3.2.5 Persyaratan Ruang 42
3.2.5 Besaran Ruang 45
3.3. Analisis eksternal 52
3.3.1 Perletakan 53
3.3.2 Zonasi 54
3.3.3 Orientasi 55
3.3.4 Sirkulasi 56
3.3.5 Vegetasi 57
3.4 Analisis Tata masa dan gubahan bentuk 58
3.5 Analisis Struktur 60
3.6 Analisis Utilitas 62
3.7 Analisis Fisika Bangunan 67
3.7.1 Penghawaan 67
3.7.2 Pencahayaan 68
3.7.3 Akustika 68

BAB IV KONSEP PERANCANGAN 69
4.1 Konsep Fungsi dan tema Perancangan 69
4.2 Konsep Internal 71
4.2.1 Program Ruang 71
4.2.1 Skematik ruang dalam 71
4.3 Konsep eksternal 73
4.3.1 Konsep Perletakan 73
4.3.2 Konsep Zonasi 74
4.3.3 Konsep Orientasi 75
4.3.4 Konsep Sirkulasi 75
4.3.5 Konsep Vegetasi 76
4.3.6 Konsep Skematik Ruang Luar 77
4.5 Konsep Gubahan Bentuk 78
4.6 Konsep Struktur 79
4.7 Konsep Utilitas 81
4.7.1 Sistem Jaringan Air Bersih 81
4.7.2 Sistem Jaringan Air Kotor 82
4.7.3 Sistem Jaringan Listrik Dan Lampu 82
4.7.4 Sistem Penghawaan Bangunan 83
4.7.5 Sistem Keamanan Bangunan 83
4.7.6 Sistem Kebakaran Bangunan 84
4.8 Konsep Fisika Bangunan 84
BAB V PRA RANCANGAN 86
5.1 Situasi 86
5.2 Siteplan 87
5.3 Denah 87
5.4 Tampak 89
5.5 Potongan 91
5.6 Suasana Eksterior 91
5.6 Suasana Interior 93

DAFTAR PUSTAKA.....96

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Keaslian Perancangan 5
Tabel 3. 1 Kebutuhan ruang 1 30
Tabel 3. 2 Kebutuhan ruang 2 31
Tabel 3. 3 Kebutuhan ruang 3 32
Tabel 3. 4 Kebutuhan ruang 4 33
Tabel 3. 5 Kebutuhan ruang 5 34
Tabel 3. 6 Kebutuhan ruang 6 35
Tabel 3. 7 Kebutuhan ruang 7 36
Tabel 3. 8 Persyaratan ruang 1 42
Tabel 3. 9 Persyaratan Ruang 2 43
Tabel 3. 10 Persyaratan Ruang 3 44
Tabel 3. 11 Besaran ruang 45
Tabel 3. 12 Besaran ruang 46
Tabel 3. 13 Besaran ruang 47
Tabel 3. 14 Besaran ruang 48
Tabel 3. 15 Besaran ruang 49
Tabel 3. 16 Besaran ruang 50
Tabel 3. 17 Besaran ruang 51
Tabel 3. 18 Besaran ruang 52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 . 1 Pemkab melawi mewacanakan pembangunan mpp 2
Gambar 1 . 2 Diagaram Alur Perancangan 10
Gambar 2. 1 Peta wilayah Kabupaten melawi 17
Gambar 2. 2 Gawai dayak kabupaten melawi..... 18
Gambar 2. 3 Peta Tata Ruang Wilayah Kabupaten Melawi pada tahun 2016 hingga tahun 2036..... 18
Gambar 2. 4 Mpp batam..... 19
Gambar 2. 5 Denah mpp batam..... 20
Gambar 2. 6 Intansi mpp..... 21
Gambar 2. 7 Mpp yogyakarta..... 21
Gambar 2. 8 Lobi mpp 22
Gambar 2. 9 Denah MPP Yogyakarta..... 23
Gambar 2. 10 Tbilisi Public Service Hall 24
Gambar 2. 11 Denah 25
Gambar 2. 12 Lobi 26
Gambar 3. 1 Fungsi bangunan 27
Gambar 3. 2 Pelaku..... 29
Gambar 3. 3 Hubungan Ruang..... 37
Gambar 3. 4 Hubungan Ruang..... 37
Gambar 3. 5 Hubungan ruang 38
Gambar 3. 6 Organisasi ruang..... 39
Gambar 3. 7 Organisasi Ruang 40
Gambar 3. 8 Organisassi ruang 41
Gambar 3. 9 Opsi Site 53
Gambar 3. 10 Analisis Perletakan..... 54
Gambar 3. 11 Analisis zoning..... 55
Gambar 3. 12 Analisis Orientasi 56
Gambar 3. 13 Analisis Sirkulasi..... 57
Gambar 3. 14 Analisis Vegetasi..... 58

Gambar 3. 15 Analisis Tata masa 59
Gambar 3. 16 Analisis gubahan bentuk 60
Gambar 3. 17 Analisis struktur 61
Gambar 3. 18 Analisis sumber air bersih 62
Gambar 3. 19 Analisis air kotor 63
Gambar 3. 20 Analisis sumber jaringan listrik 64
Gambar 3. 21 Analisis penghawaan 65
Gambar 3. 22 Analisis sistem cctv 66
Gambar 3. 23 Analisis sistem kebakaran 67
Gambar 4. 1 Pendektan placemaking 70
Gambar 4. 2 Tata ruang lantai 1 73
Gambar 4. 3 Tata ruang lantai 2 73
Gambar 4. 6 Konsep Orientasi 75
Gambar 4. 7 Konsep sirkulasi 76
Gambar 4. 8 Konsep vegetasi 77
Gambar 4. 9 Konsep tata ruang luar 78
Gambar 4. 10 Konsep gubahan bentuk 79
Gambar 4. 11 Konsep Struktur 81
Gambar 4. 12 Konsep Air bersih 82
Gambar 5 . 1 Situasi 86
Gambar 5 . 2 Siteplan 87
Gambar 5 . 3 Denah lantai 1 88
Gambar 5 . 4 Denah lantai 2 89
Gambar 5 . 5 Tampak samping kanan 90
Gambar 5 . 6 Tampak samping kiri 90
Gambar 5 . 7 Tampak belakang 90
Gambar 5 . 8 Tampak depan 90
Gambar 5 . 9 Potongan a-a 91
Gambar 5 . 10 Potongan b-b 91
Gambar 5 . 11 Suasana ruang luar 92

Gambar 5 . 12 Suasana depan bangunan..... 92
Gambar 5 . 13 Suasana bangunan 93
Gambar 5 . 14 Susasan ruang tunggu..... 94
Gambar 5 . 15 Area tengah 95
Gambar 5 . 16 Suasana loket dan ruang tunggu..... 95

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan administratif, perizinan, dan akses terhadap berbagai bentuk layanan dasar yang disediakan oleh negara, saat ini Pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang signifikan.

Layanan Publik yang ada tingkat daerah, hal ini diemban oleh pemerintah kabupaten/kota melalui berbagai instansi yang tersebar di lokasi berbeda. Namun dalam praktiknya, sistem ini sering kali menimbulkan hambatan terkait layanan publik seperti kurang fasilitas yang memadai, tidak adanya wadah yang menampung aspirasi masyrakat.

Kondisi tersebut juga terjadi di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Masyarakat di daerah ini masih menghadapi kesulitan saat mengurus dokumen penting khususnya. Mereka kerap kali harus datang ke beberapa kantor berbeda hanya untuk menyelesaikan satu jenis layanan, yang tidak hanya memakan waktu, tetapi juga membebani secara biaya dan tenaga.

Tidak hanya persoalan teknis, dimensi sosial dari pelayanan publik juga masih kurang diperhatikan. Masih minimnya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, atau sekadar bertanya mengenai layanan yang tersedia menunjukkan belum optimalnya komunikasi antara pemerintah dan masyrakat. Hal ini tentu berdampak pada tingkat kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan yang ada. Selain itu, keberadaan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas sering kali belum mendapat perhatian yang memadai dalam penyediaan fasilitas didalam bangunan layanan publik. Akses yang terbatas dan desain yang tidak inklusif menjadi salah satu bentuk nyatadari permasalahan yang terjadi di layanan publik .

Melihat berbagai kendala tersebut, muncul kebutuhan akan suatu sistem pelayanan yang lebih terpusat, terpadu, dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Salah satu bentuk konkret dari gagasan ini adalah pembangunan Mal Pelayanan

Publik (MPP). Pemerintah pusat sendiri telah mendorong pembentukan MPP melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021. Regulasi ini menekankan pentingnya pelayanan publik satu pintu yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu gedung agar masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah tempat.

Di tingkat daerah, kebijakan ini mendapat dukungan dari dokumen perencanaan seperti RPJMD Kabupaten Melawi serta beberapa regulasi daerah yang mengatur mekanisme layanan aduan dan pengelolaan aspirasi publik. Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Melawi menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kualitas layanan dengan membentuk MPP sebagai pusat pelayanan terintegrasi.

Dilansir dari MelawiNews.com, suarapemredkalbar.com dan WartaMelawi.com Respon Pemerintah daerah Kabupaten Melawi melalui Forum Konsultasi Publik pada 18 Oktober 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyampaikan rencana pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang akan segera dibangun tepatnya di Kecamatan Nanga Pinoh yaiu ibukota dari Kabupaten Melawi, pada gambar 1.1 adalah momen dimana pemerintah kabupaten melawi sedang melaksanakan forum penyelangaraan mal pelayanan public.

Permudah Layanan Masyarakat, Pemkab Melawi Wacanakan Mall Pelayanan Publik



Gambar 1 . 1 Pemkab melawi mewacanakan pembangunan mpp
Sumber : www.suarapemredkalbar.com

Dalam RPJMD Kabupaten Melawi Tahun 2021–2026, pemerintah daerah menyatakan komitmen untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. Pemerintah menyadari bahwa pelayanan yang belum optimal justru bisa menjadi hambatan dalam jangka panjang, baik dari segi kepuasan masyarakat maupun efektivitas kerja instansi itu sendiri.

Peraturan Bupati Melawi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Layanan Aduan Aspirasi Masyarakat Cepat Peraturan ini mendorong untuk pemerintah menyediakan adanya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan ide, kritik, dan saran, serta memastikan aspirasi mereka bisa direspons dengan cepat salah satunya yaitu dengan cara membangun Mal Pelayanan Publik.

Dengan adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Melawi diharap akan mempermudah akses masyarakat terkait pelayan publik pemerintahan. Dengan konsep pelayanan di satu tempat, Mall Pelayanan Publik (MPP) memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus berbagai kebutuhan administratif tanpa harus berpindah-pindah tempat, sehingga waktu dan biaya yang diperlukan dapat dihemat.

1.2 Rumusan Masalah Perancangan

Berdasarkan Latar Belakang diatas dapat ditarik permasalahan dalam merancang Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Melawi sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Melawi yang mampu mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan publik ke dalam satu kawasan terpadu secara efektif dan efisien?
2. Bagaimana desain arsitektur dapat mewadahi fungsi pelayanan publik dengan baik sekaligus mendorong partisipasi masyarakat, komunikasi dua arah, menjadi magnet dan transparansi dalam proses pelayanan?

1.3 Tujuan Perancangan

Adapun Tujuan Pernacangan Mal Pelayanan Publik Dikabupaten Melawi :

1. Terciptanya Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Melawi sebagai ikon baru/citra baru daerah yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat layanan pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga menghadirkan

berbagai fasilitas rekreasi serta komersil yang mendukung pengalaman pelayanan publik yang lebih nyaman, menarik, dan inovatif. Dengan konsep yang modern dan ramah bagi semua kalangan.

1.4 Sasaran Perancangan

Berikut sasaran dalam merancang Mal Pelayanan Publik Kabupaten Melawi:

1. Mengididentifikasi apa itu Mal Pelayanan Publik.
2. Mengididentifikasi isu permasalahan dan potensi yang ada di Kabupaten Melawi maupun secara umum.
3. Mengidentifikasi Bangunan Mal Pelayanan Publik dari Studi Kasus maupun Studi Literatur.
4. Menganalisa pelaku, kegiatan, dan program ruang.
5. Menentukan Lokasi Perancangan.
6. Menganalisa Site Perancangan.
7. Merumumuskan dan membuat Konsep Bangunan.
8. Menggambar Konsep Bangunan.
9. Menganalisis dan merumuskan konsep terkait struktur, utilitas, kenyamanan termal bangunan, ditinjau dari penghawaan, pencahayaan dan akustika bangunan.
10. Menggambar Prarancangan dan gambar kerja.

1.5 Lingkup Lokasi dan Perancangan

Lingkup lokasi dan pembahasan yang akan dibahas dalam rencana perancangan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Melawi yaitu:

1. Lokasi Perancangan Mal Pelayanan Publik ini akan diancang di Ibukota Kabupaten Melawi Yaitu Kecamatan Nanga Pinoh.
2. Merancang Mal Pelayanan Publik yang dapat memfasilitasi dan mewadahi kegiatan masyarkat dalam bidang layanan publik

1.6 Metode Perancangan

1.6.1 Keaslian Perancangan

Tabel 1. 1 Keaslian Perancangan

Perancang	Judul Perancang	Fungsi	Metode	Hasil
Tondi Akbar Lubis (2022)	Perancangan Mall Pelayanan Publik (MPP) Dengan Pendekatan Arsitektur Kontemporer Di Kabupaten Asahan	Sebagai bangunan untuk memfasilitasi segala kegiatan pelayanan serta untuk mendukung kebijakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Asahan.	Mengumpulkan data tapak, pengguna, studi literatur, selanjutnya menentukan persoalnya/tema lalu kekonsep bangunan	Rancangan Mall Pelayanan Publik (MPP) Dengan Pendekatan Arsitektur Kontemporer Di Kabupaten Asahan
Sindy Daisy Cahyany (2023)	Perencanan dan perancangan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Banyuasin	Sebagai wadah dalam peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dandiharapkan dapat meningkatkan	Melaksanakan pengumpulan data, perumusan masalah, dan pendekatan perancangan	Rancangan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Banyuasin

		jumlah investor yang dapat meningkatkan roda perekonomian di Musi banyuasin.		
Defcris Yaldiso Saiman (2025)	Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Melawi	Sebagai wadah tempat bangunan pelayanan publik di kabupaten melawi yang dimana akan merasakan layanan publik	Melaksanakan pengumpulan data dan isu permasalahan yang ada di lokasi, perumusan masalah, dan pendekatan perancangan	Rancangan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Melawi

Sumber: Penulis, 2025

1.6.2 Pendekatan Perancangan

Merespon dari isu permasalahan yang ada maka dari itu dalam merancang Mal Pelayanan Publik ini menggunakan pendekatan Placemaking yang dimana menurut Liestianto(2023) Placemaking merupakan pendekatan perencanaan dan perancangan ruang publik yang menekankan kekayaan lokal untuk memperkuat pengalaman manusia terhadap suatu tempat. Placemaking memiliki empat kriteria dalam menciptakan suatu desain, yaitu: : aksesibilitas & saling terhubung, kenyamanan & citra, penggunaan & aktivitas, dan sosial.

menurut Nugroho(2022) kemudahan akses dan konektivitas yang baik, memiliki reputasi yang positif dan menciptakan suasana yang nyaman untuk melakukan berbagai aktivitas bagi pengunjung memiliki kesempatan untuk terlibat dalam beragam kegiatan/keperluan di area tersebut. menurut Juliana(2022) Placemaking adalah yang dapat diakses dan saling terhubung dengan baik ketempat tempat penting lainnya di daerah tersebut. berada ditempat tersebut melakukan aktivitas ditempat tersebut. placemaking pada ruang publik dapat memberikan identitas pada fisik, budayadan sosial yang mendefinisikan suatu tempat yang mendukung evolusi berkelanjutan. Selain itu, dapat meningkatkan nilai dalam suatu lingkungan dan mendorong terciptanya interaksi yang terjadi diantara Masyarakat.

Yang dapat di artikan membuat tempat yang nyaman Desain dengan Fokus pada Pengalaman Pengguns hal ini dapat mempengaruhi isi dalam bangunan antara lain dibuatkan tempat tunggu yang nyaman seperti penyusunan bangunan maupun pola ruang yang mempermudah pengguna didalamnya dan juga tidak membuat pelaku didalamnya merasa bosan saat melahkukan keperluan didalamnya, fasilitas pendukung aktivitas pelaku didalamnya .

1.6.3 Metode Perancangan

Penerapan pada metode perancangan kali ini menggunakan metode perancangan menurut H.Rittie(1970) yang dimana dimulai dengan memahami masalah masalah yang ada untuk diselesaikan, selanjutkan memlakukan riset untuk mengumpulkan data data yang diperlukan yang akan mempengaruhi konsep, setelah data informasi cukup akan dikembangkan ke beberapa konsep, selanjutnya melaksanakan anilisis teknis seperti struktur dan estetika.

1.6.4 Objek Perancangan

Perancangan "Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Melawi ini bertujuan sebagai wadahi dimana terjadi kegiataan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus berbagai kebutuhan administratif tanpa harus berpindah-pindah tempat, didalam satu tempat yang menggabungkan berbagai jenis layana publik dari pemerintah, swasta, maupun dengan berbagai fungsi pendukung yang membantu pelaku didalamnya.

1.6.4 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Didalam proses pengumpulan data untuk merancang Mal Pelayanan Publik ini terbagi menjadi 2 aspek yaitu :

a. Jenis Data

Dalam merancang Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Melawi ini Data terbagi menjadi dua yaitu :

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang didapatkan secara turun lansung ke lapangan dengan beberapa ketentuan yang sudah ditentukan oleh penulis, yaitu:

   a) Data Lokasi tapak perancangan
   b) Wawancara dengan pihak yang terilbat yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Melawi

2. Data Sekunder

   Data sekunder merupakan data yang berkaitan dengan perancangan peniliti memelalui jurnal, buku, berita dan lain-lain.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data yang diterapkan pada perancangan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Melawi ini antara lain:

1. Wawancara

   Wawancara merupakan bentuk Teknik pengumpulan data dengan cara menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan perancangn Mal

Pelayanan Publik di Kabupaten Melawi seperti Lokasi tapak, kebutuhan ruang, dan latar belakang masalah.

2. Observasi

   Observasi merupakan Teknik yang dimana peniliti mengamat secara lansung ke lapangan untuk mengumpulkan data agar memahami dan mengamati data secara langsung.

3. Dokumentasi

   Dokomentasi merupakn Teknik mengumpulkan data secara lansung dengan cara mengambil data dalam bentuk foto maupun video di Lokasi tapak yang telah di tentukan dan data data dari hasil wawancara.

4. Studi Literatur

   Studi Literatur merupakan Teknik mengumpulkan data dimana Peniliti mencari, mencatat, merangkum, dan memahami data informasi yang berkaitan dengan Perancangan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Melawi, antara lain sumber informasi tersebut berasal dari buku, jurnal, berita dan penilitian

1.6.5 Teknik Analisis dan Sintesis

Dalam merancang Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Melawi peniliti meninjau data data yang telah dikumpulkan lalu dianalisis, Adapun beberapa aspek yang digunakan, yaitu:

a. Analisis Fungsi
b. Analisis Pengguna
c. Analisis Program Ruang
d. Analisis Tapak
e. Analisis Bentuk
f. Analisis Struktur
g. Analisis Utilitas

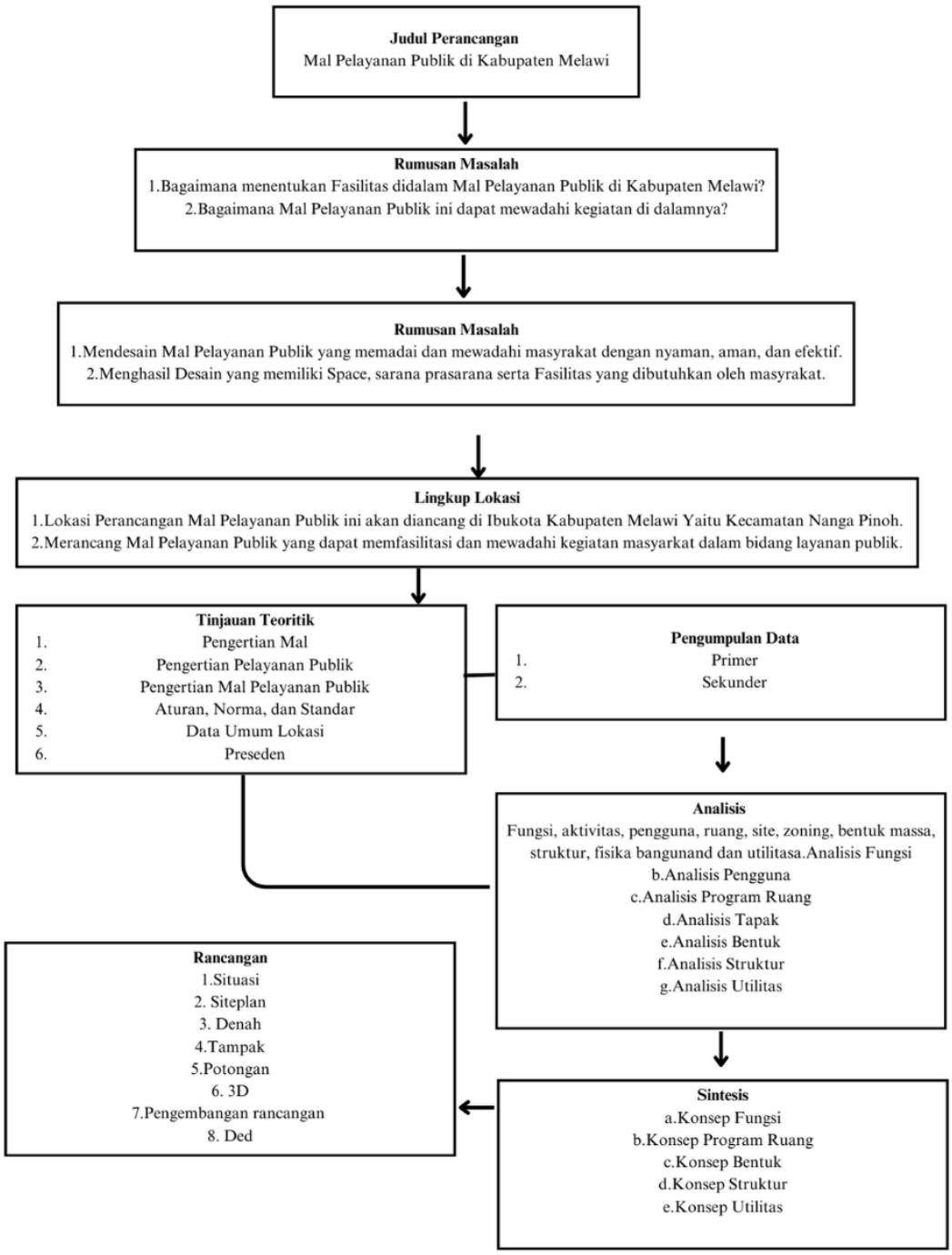
Setelah itu hasil analisis didapat kan , dilanjutkan dengan Teknik sintesis yang meliputi, yaitu:

a. Konsep Fungsi
b. Konsep Program Ruang
c. Konsep Bentuk

d. Konsep Struktur

e. Konsep Utilitas

1.6.5 Diagram Alur Perancangan



Gambar 1 . 2 Diagaram Alur Perancangan

Sumber: Penulis, 2025

1.7 Metode Perancangan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam laporan ini terdiri oleh 3 (tiga) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan perancangan, sasaran perancangan, lingkup lokasi dan pembahasan, metodologi perancangan, sistematika penulisan, serta alur teknis diagram perancangan pusat kegiatan mahasiswa Utama.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan tinjauan teoritis yang memberikan secara umum pemahaman mengenai pusat kegiatan mahasiswa Utama, variabel-variabel atau parameter yang dibutuhkan dalam perancangan dan menurut tinjauan teoritis, aturan dan standar, dan landasan nilai-nilai untuk mengisi sebagai esensi desain.

Bab III Landasan Konseptual

Bab ini berisikan kesimpulan perancangan, program desain perancangan pusat kegiatan mahasiswa Universitas Tanjungpura dengan mengidentifikasi permasalahan melalui pendekatan yang digunakan dan konsep yang dihasilkan. Bab ini juga berisikan program ruang, besaran ruang, kebutuhan ruang, karakter ruang, struktur modular, analisis standar dan analisis utilitas.

Bab IV Konsep Perancangan

Bab ini berisikan hasil dari tirai arsitektural untuk pusat kegiatan mahasiswa Utama berdasarkan hasil pendekatan dan analisis. Serta terdapat rancangan analisis konsep perancangan awal, dengan konsep massa, konsep tapak, konsep bentuk, konsep interior, konsep eksterior/tampilan, konsep pendekatan budaya, konsep struktur dan konsep utilitas.

Bab V Pra rancangan

Bab ini berisikan hasil dari hasil rancangan yang berbentuk gambar pra perancangan pusat kegiatan mahasiswa Utama yang memuat site plan, denah, tampak, potongan, suasana eksterior dan suasana interior dari pusat kegiatan mahasiswa Utama.

Daftar Pustaka

Daftar pustaka ini berisikan semua sumber rujukan yang penulis gunakan untuk menyusun laporan perancangan pusat kegiatan mahasiswa Utama, baik berupa literatur dari literasi, hasil jurnal, maupun berupa media lainnya.